

NASIONALISME EKONOMI DI INDONESIA **(Prespektif Ekonomi Islam dalam Al-Qur'an dan Hadis)**

Ifdlolul Maghfur, Moh. Mukhsinin Syu'aibi

Universitas Yudharta Pasuruan

ifdholulmaghfur@yudharta.ac.id, mukhsinin.2000@gmail.com

***Abstract:** Economic nationalism in the perspective of Islam for its adherents not only becomes religion and state in the sense of Western studies but it is also a system that encompasses all aspects of human life in the sphere of the state and nation. In his book, Marcel Boisard considers that the universality of Islam as a religion and social system can be proven in five aspects: the metaphysical aspect, the religious aspect, the sociological aspect, the economic aspect and the political aspect. Nationalism or belief in one's own product as a faith in the Essence of God as outlined in a very strong belief, Islam is a universal ideology that cannot be equated with any ideology and religion.*

***Keywords:** Nationalism, Islamic economics,*

Abstrak: Nasionalisme ekonomi dalam perspektif Islam bagi penganutnya tidak hanya menjadi agama dan negara dalam arti studi Barat, tetapi juga sistem yang mencakup semua aspek kehidupan manusia di bidang negara dan bangsa. Dalam bukunya, Marcel Boisard menganggap bahwa universalitas Islam sebagai agama dan sistem sosial dapat dibuktikan dalam lima aspek: aspek metafisik, aspek keagamaan, aspek sosiologis, aspek ekonomi dan aspek politik. Nasionalisme atau kepercayaan pada produk sendiri sebagai keyakinan pada Esensi Tuhan sebagaimana diuraikan dalam keyakinan yang sangat kuat, Islam adalah ideologi universal yang tidak dapat disamakan dengan ideologi dan agama apa pun.

Kata kunci: Nasionalisme, ekonomi Islam,

PENDAHULUAN

Pada masa Yunani kuno, ada kepercayaan bahwa manusia dilahirkan dengan naluri thymos, yakni kebutuhan akan pengakuan atau penghargaan yang sering kali diwujudkan dengan semangat membela kelompok, suku

bangsa, atau kota. Sifat naluriah ini tampak pula dalam suatu konsep yang kerap disebut nasionalisme ekonomi. Setiap negara tentu selalu mengedepankan kepentingan nasional, dan karena itu konsep nasionalisme ekonomi bisa ditemukan di negara mana pun, bahkan di AS yang dianggap selalu berorientasi "pasar bebas". Slogan "buy American" atau panggilan untuk mengonsumsi produk-produk AS, misalnya, adalah salah satu contohnya. Upaya mendorong konsumsi produk nasional ini juga banyak dilakukan di negara-negara lain, termasuk di Indonesia. Istilah nasionalisme ekonomi memiliki beragam interpretasi, dan interpretasi ini ikut membentuk pilihan-pilihan kebijakan ekonomi nasional. Karena itu, penting memahami definisi dan interpretasi ini lebih mendalam agar kebijakan ekonomi yang muncul dari definisi tersebut adalah kebijakan yang mengedepankan kepentingan nasional. Untuk memastikan bahwa nasionalisme ekonomi di Indonesia bisa benar-benar mencapai kepentingan nasional, semangat nasionalisme ekonomi ini perlu diterapkan serta disikapi secara bijak dan pada porsinya. Penerapan nasionalisme ekonomi yang kurang tepat justru bisa menghambat pertumbuhan ekonomi, dan pada akhirnya tidak sejalan dengan upaya membawa kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.

PENGERTIAN NASIONALISME

Nasionalisme Berasal dari kata "nation" yang berarti bangsa. Bangsa mempunyai dua pengertian, yaitu dalam pengertian antropologis serta sosiologis, dan dalam pengertian politis. Dalam Pengertian antropologis sosiologis, bangsa adalah suatu masyarakat yang merupakan suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing - masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat.¹

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia,² kata bangsa memiliki arti: (1) kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri (2) golongan manusia, binatang, atau tumbuh-tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan dan (3) kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum, dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi.

¹ Ali, Lukman. Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), hal 89

² *Ibid*, hal 89.

Nasionalis ekonomi Islam, maka hendaklah melihat seluruh ajaran Islam. Islam adalah agama sederhana yang tidak mengajar dan mendidik manusia untuk berlebih-lebihan dalam berbuat dan bertindak, tetapi agama mengajar agar kita berbuat kekuasaan dalam arti sederhana, bukan kapitalis, sosialis maupun liberalis. Sebab Islam itu mengajarkan umatnya bersifat sederhana. Allah telah berfirman dalam surat al-Furqan ayat 67 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا ﴿٦٧﴾

Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. (Qs. al-Furqan: 67)

Manusia di dunia mempunyai sifat untuk menentukan kehidupan dan kepentingan manusia bersama. Dalam hubungan social, Islam tidak melarang atau melepaskan kegiatan manusia dari urusan dunia juga tidak boleh menjauhkan diri dari dunia.

Seorang muslim harus bisa memanfaatkan dunia, menguasai, dan memiliki harta benda dan uang hendaknya sejalan dengan aturan syariah. Kalau sekiranya uang dan harta benda dimiliki oleh umat Islam, maka dia hendaklah menjalankan ekonomi dalam arti yang meluas.

Untuk menjalankan Nasionalisme Ekonomi Islam meletakkan prinsip-prinsip utama dalam peraturan ekonomi seperti :

1. Uang yang baik lagi halal dianggap sebagai soko guru dalam hidup yang wajib, dijaga, dan diusahakan daerah peredarannya.
2. Pokok persoalan ini didapatkan kepastiannya dari Qur'an Hadits. Rasulullah SAW bersabda yang artinya: "Uang yang baik adalah untuk manusia yang baik pula.

Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surat an-Nisa ayat 5 yang berbunyi:

وَلَا تُوْتُوا السُّفَهَاءَ اَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيْهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٥﴾

Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum Sempurna akal nya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka

belanja dan Pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. (Qs. an-Nisa: 5)

Mencari sumber-sumber kekayaan bumi dan mempergunakan segala yang terdapat di dalam kosmos ini baik yang berupa bahan-bahan baku maupun bahan energy dan lain sebagainya. Dalam al-Qur'an Allah berfirman dalam surah Jaatsiyah ayat 13 yang berbunyi:

وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ

يَتَفَكَّرُونَ ﴿١٣﴾

Dan dia Telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya, (sebagai rahmat) daripada-Nya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kekuasaan Allah) bagi kaum yang berfikir.

(Qs. Jaatsiyah: 13)

Pengertian Nasionalis, bangsa adalah masyarakat dalam suatu daerah yang sama dan mereka tunduk kepada kedaulatan negaranya sebagai suatu kekuasaan tertinggi ke luar dan ke dalam. Bangsa (nation) dalam pengertian politis inilah yang kemudian menjadi pokok pembahasan nasionalisme³.

Nasionalisme berasal dari kata 'nation' (Inggris) yang berarti bangsa. Ada beberapa tokoh mengemukakan tentang pengertian Nasionalisme, yaitu:

1. Menurut Ernest Renan: Nasionalisme adalah kehendak untuk bersatu dan bernegara.
2. Menurut Otto Bauar: Nasionalisme adalah suatu persatuan perangai atau karakter yang timbul karena perasaan senasib.
3. Menurut Hans Kohn: Nasionalisme secara fundamental timbul dari adanya National Counciousness. Dengan perkataan lain nasionalisme adalah formalisasi (bentuk) dan rasionalisasi dari kesadaran nasional berbangsa dan bernegara sendiri. Dan kesadaran nasional inilah yang membentuk nation dalam arti politik, yaitu negara nasional. Untuk lebih jelas lagi perlu kita perhatikan beberapa definisi nasionalisme berikut ini!
4. Menurut L. Stoddard: Nasionalisme adalah suatu kepercayaan yang dimiliki oleh sebagian terbesar individu di mana mereka menyatakan rasa

³ Yatim, Badri, Soekarno, *Islam, Dan Nasionalisme*, (Bandung: Nuansa, 2001), hal 57-58.

kebangsaan sebagai perasaan memiliki secara bersama di dalam suatu bangsa.

Menurut Dr. Hertz dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* mengemukakan empat unsur nasionalisme, yaitu:

1. Hasrat untuk mencapai kesatuan.
2. Hasrat untuk mencapai kemerdekaan.
3. Hasrat untuk mencapai keaslian.
4. Hasrat untuk mencapai kehormatan bangsa.

Dari definisi itu nampak bahwa negara dan bangsa adalah sekelompok manusia yang:

1. Memiliki cita-cita bersama yang mengikat warga negara menjadi satu kesatuan.
2. Memiliki sejarah hidup bersama sehingga tercipta rasa senasib sepenanggungan.
3. Memiliki adat, budaya, dan kebiasaan yang sama sebagai akibat pengalaman
4. Hidup menempati suatu wilayah tertentu yang merupakan kesatuan wilayah dan sama.
5. Teroganisir dalam suatu pemerintahan yang berdaulat sehingga mereka terikat dalam suatu masyarakat hukum.

Sejarah Timbulnya Nasionalisme Ekonomi dalam Islam

Munculnya faham nasionalisme berawal dari munculnya fanatik golongan, fanatik ini muncul bersamaan dengan munculnya makhluk yang bernama manusia. Mungkin fenomena tersebut belum begitu nampak pada keluarga “Adam”, yang merupakan cikal bakal umat manusia. Karena jumlah keturunannya yang masih sedikit waktu itu. Walaupun begitu, isyarat akan menambah wabah “fanatik golongan” di anak keturunannya nampak jelas ketika terjadi percekocokan antara dua putra Adam yang mengakibatkan tumpahnya darah manusia pertama kali di bumi persada ini, sebagaimana yang telah digambarkan Allah di dalam surat al-Maidah ayat : 27-31.

Perselisihan antar anggota keluarga itu terulang kembali di dalam skala yang lebih besar, yaitu ketika adanya suatu usaha pembunuhan yang dilakukan oleh saudara-saudara nabi Yusuf (bendahara kerajaan Mesir). Sejarah yang diabadikan al Quran di dalam satu surat tersebut, menggambarkan bagaimana kekeringan, kelaparan, makanan, serta bahaya sebuah kedengkian yang muncul dari perasaan bangga terhadap sebuah

kelompok antar suku bangsa. Hanya karena berbeda ibu (Kapitalis, Sosialis dan Syariah), mereka menyimpan kebencian yang sangat kepada saudaranya yang tidak berdosa itu.⁴

Api perselisihan di lingkungan keluarga itu akhirnya membesar dan berpindah kepada tingkat kesukuan dan kebangsaan. Merujuk cerita tersebut, bisa diartikan perselisihan sumber alam untuk kehidupan bisa membahayakan bagi negara yang banyak sumber alamnya untuk dieksploitasi dari negara lain yang lebih kuat untuk memenuhi kebutuhan ekonomi negaranya.

Fir'aun dan bala tentaranya yang berusaha untuk memusnahkan etnis Bani Israel dari bumi Mesir adalah salah satu contoh dari drama kehidupan masyarakat yang terjebak didalam fanatik kelompok dan kesukuan. Setiap bayi laki-laki yang lahir tidak diberinya kesempatan untuk bernafas lebih lama di negara lembah Niel tersebut. Peristiwa tragedi kemanusiaan tersebut mewarnai banyak lembaran-lembaran di dalam al Qur'an. Permusuhan itu tak kunjung padam sampai diutusny Nabi Musa As untuk merubah pertarungan etnis tersebut menjadi pertarungan antara Haq dan Bathil.

Kefanatican kadang-kadang membuat seseorang kehilangan akal, membabi buta, mengumbar hawa nafsu bahkan mengantarnya pada derajat kebinatangan. Sifat inilah yang akhirnya mendominasi kehidupan bangsa Arab pada masa jahiliyah. Salah satu buktinya seperti yang diungkapkan Ibnu Katsir di dalam bukunya "*Bidayah wa Nihayah*", tentang terjadinya peperangan antara bani Khoza'ah dan Jarhamiyin yang tak pernah kunjung padam di dalam memperebutkan Ka'bah.⁵

Di dalam Tafsir Ibnu Katsir disebutkan, bahwa ayat ini diturunkan kepada Auz dan Khozroj, ketika seorang Yahudi berusaha mengobarkan api kedengkian dan perpecahan antara dua kabilah tersebut, dengan mengungkit-ungkit masalah-masalah yang telah silam pada waktu jahiliyah. Tat kala berita itu sampai pada Rasulullah saw, bergegaslah beliau menuju tempat bertemunya dua kelompok tersebut untuk memadamkan api perpecahan itu, sebelum berubah menjadi pertumpahan darah seraya berseru: "Apakah kalian akan mengobarkan faham Jahiliyah, padahal saya masih berada diantara kalian?". Kemudian Rasulullah saw. Membaca ayat tersebut.⁶

⁴ Sriedi Swasono, *Ekspose Ekonomika: Kompetensi dan Integritas Sarjana Ekonomi* (Jakarta UI-Press, 2003) hal 21.

⁵ Ibnu Katsir, *Bidayah wa Nihayah*, Juz: 2, hal. 20.

⁶ Ibnu Katsir, *Tafsirul Quranul Adhim*, (Beirut, Alam al-Kutub), juz: 1, hal. 347.

Tidak menutup kemungkinan, perasaan bangga terhadap kesukuan tersebut, suatu saat akan timbul didalam kehidupan para sahabat, baik ketika Rasulullah saw masih berada di tengah-tengah mereka, seperti kejadian di atas maupun setelah wafatnya Rasulullah saw, seperti pada peristiwa di Saqifa Bani Sa'ad, ketika terjadi klies antara Muhajirin dan Anshor di dalam menentukan kholifah pengganti Rosulullah saw.⁷

Namun pemahaman jahiliyah tersebut cepat hilang lagi, manakala mereka diingatkan lagi kepada kebenaran. Dengan demikian nasionalisme tidak sempat berkembang di kalangan sahabat, sebuah potret masyarakat yang telah diajarkan oleh Rasulullah saw.

Namun sangat disayangkan sekali, keadaan tersebut tidak berlangsung lama. Fahaman nasionalisme itu mulai berkembang lagi pada generasi sesudahnya, tepatnya sejak berakhirnya Khulafaur Rasyidin, kemudian semakin hari semakin bertambah. Dan prosentasinya memuncak pada hari ini. Penyakit inilah yang akhirnya mengantarkan pada runtuhnya Daulah Umamiyah dan Daulah Abasiyah, yang di kemudian hari akan menyebabkan ambruknya khilafah Islamiyah pada abad XX.

Rahasia keruntuhan Khilafah-khilafah Islamiyah tersebut pernah ditulis Abul A'la Al Maududi di dalam bukunya "*Islamul Yaum*". Tokoh pemikir Islam yang produktif tersebut mengatakan:

“Bahwa penyakit kronis ini menyebabkan hancurnya Daulah Umawiyah dan menjadi pemicu perpecahan antara kabilah-kabilah Arab waktu itu, dan karenanya pula runtuhlah pondasi Daulah Umawiyah yang berada di Andalus begitu juga yang menyebablan rontoknya wilayah Islamiysh Haidar Abad di India.”⁸

Nasionalisme ekonomi kita mewujudkan perkembangan tentang nasionalisme ekonomi itu sendiri. Nasionalisme ekonomi menolak dengan tegas dominasi asing atas perekonomian Negara Kesatuan Republik Indonesia, baik di bidang investasi, pasar modal, barang-barang impor, maupun ketergantungan kepada utang luar negeri. Kaum nasionalis ini mengecam kebijakan divestasi dan privatisasi BUMN yang menjadi instrumen para agen globalisasi. Nasionalisme ekonomi yang membawa kemajuan negara dan bangsa memang tak menutup pintu bagi masuknya peran luar negeri untuk bekerjasama. Namun, nasionalisme ekonomi

⁷ Ibnu al Aroby, *al Awashim minal Qowashim*, hal. 56, 61.

⁸ Abul A'la Al Maududi, *Islamul Yaum*, hal 35.

memerlukan peran pemerintah (Khalifah) berlandaskan semangat kebangsaan kuat dan membawa bangsanya maju sejahtera.

NASIONALISME EKONOMI MENURUT BARAT

Nasionalisme di era milenium baru ini dianggap sebagai suatu kekuatan yang tak adaandingannya di dunia masa kini. Hal itu bisa terlihat pada fenomenal beberapa negara di eropa dikenal sebagai pendukung pasar bebas belakangan yang marak dengan aksi anti perusahaan asing. Eropa yang sadar gencar melakukan gelombang merger lintas negara terbesar,, sejak ledakan dotcom tahun 2000, dikagetkan aksi anti-kepemilikan perusahaan asing (anti foreign take overs).

Dalam beberapa bulan terakhir, aksi demonstrasi besar besaran terhadap the wall street simbol hegemoni kapitalisme global melanda kota di Amerika Serikat, bahkan menjalar ke eropa. Preferensi konsumen untuk membeli barang-barang lokal lebih untuk memberikan kekuatan pasar produsen lokal dan memungkinkan produsen lokal menaikkan harga agar mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Itu terjadi karena perusahaan yang memproduksi barang dapat memenuhi tuntutan pasar domestik. Konsumen yang membeli produk dari produsen lokal bisa terhindar dari kerugian jika produsen lokal memaksimalkan keuntungan dari kompetisi di dalam negeri.⁹

Dalam sejarah, nasionalisme Ekonomi bermula dari benua Eropa sekitar abad pertengahan yaitu revolusi Industri. Kesadaran berbangsa dalam pengertian nation-state dipicu oleh gerakan Reformasi Protestan yang dipelopori oleh Martin Luther di Jerman¹⁰. Saat itu, Luther yang menentang Gereja Katolik Roma menerjemahkan Perjanjian Baru kedalam bahasa Jerman dengan menggunakan gaya bahasa yang memukau dan kemudian merangsang rasa kebangsaan Jerman. Terjemahan Injil membuka luas penafsiran pribadi yang sebelumnya merupakan hak eksklusif bagi mereka yang menguasai bahasa Latin, seperti para pastor, uskup, dan kardinal.

Nasionalisme ekonomi adalah juga digunakan untuk menggambarkan kebijakan yang menekankan cinta ekonomi produk sendiri terhadap

⁹ Krussel, per, and Jose-Victor Rios Rull (1999). "On the Size Of U.S. Government: Political Economy in the Neoclassical Growth Model," *American Economic Review*, 89 (5), hlm. 1156-1181.

¹⁰ Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal 83.

pembentukan ekonomi, tenaga kerja dan modal. Cinta negara berupa regulasi seperti mensejahterahkan masyarakat, pembatasan kuota impor, dan pembatasan lainnya terhadap pergerakan tenaga kerja, barang dan modal.¹¹

Implikasi yang sedikit demi sedikit muncul adalah kesadaran tentang bangsa dan kebangsaan yang memiliki identitas sendiri. Bahasa Jerman yang digunakan Luther untuk menerjemahkan Injil mengurangi dan secara bertahap menghilangkan pengaruh bahasa Latin yang saat itu merupakan bahasa ilmiah dari kesadaran masyarakat Jerman. Mesin cetak yang ditemukan oleh Johann Gothenberg turut mempercepat penyebaran kesadaran bangsa dan kebangsaan.

Hal ini penting dicatat mengingat pada sekitar tahun yang sama (1518-1521) Majapahit mengalami kehancuran yang disebabkan oleh pemberontakan daerah-daerah dan kemerosotan internal kerajaan. Majapahit pada masanya merupakan kerajaan besar yang menguasai sebagian besar wilayah yang saat itu disebut Nusantara. Namun kebesaran ini tidak memunculkan kesadaran berbangsa, dalam arti modern. Hal itu disebabkan tidak adanya alat percetakan yang mengakselerasi penyadaran massal seperti yang terjadi di Jerman.

Wujud paling nyata Nasionalisme Ekonomi adalah proteksionisme. Proteksionisme adalah kebijakan ekonomi untuk menahan perdagangan antara Negara-negara melalui metode seperti Pajak barang impor, pembatasan kuota, dan berbagai peraturan pemerintah lainnya yang dirancang untuk memungkinkan persaingan yang jujur (Syariah) antara impor barang dan jasa yang diproduksi di dalam negeri.

Namun demikian, nasionalisme Eropa yang pada kelahirannya menghasilkan deklarasi hak-hak manusia berubah menjadi kebijakan yang didasarkan atas kekuatan dan self interest dan bukan atas kemanusiaan¹². Dalam perkembangannya nasionalisme Eropa berpindah haluan menjadi persaingan fanatisme nasional antar bangsa-bangsa Eropa yang melahirkan penjajahan terhadap negeri-negeri yang saat itu belum memiliki identitas kebangsaan (nasionalisme) di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin.

Gerakan anti globalisasi makin banyak digunakan dalam konteks ekonomi, dimana mengacu pada kebijakan proteksionisme atau doktrin yang

¹¹ Anne O. Krueger, "The Political Economy of the Rent-Seeking Society," *American Economic Review*, 64(3), 1974, hlm. 291-303.

¹² Yatim, Badri, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*, (Bandung: Nuansa, 2001), hal 91.

melindungi bisnis dan pekerja dalam suatu negara dengan membatasi atau mengatur perdagangan dengan bangsa asing

Fakta ini merujuk pada dua hal: (1) ledakan ekonomi Eropa pada masa itu yang berakibat pada melimpahnya hasil produksi dan (2) pandangan pemikir Italia, Nicolo Machiaveli, yang menganjurkan seorang penguasa untuk melakukan apapun demi menjaga eksistensi kekuasaannya. Dia menulis:

“Bila ini merupakan masalah yang mutlak mengenai kesejahteraan bangsa kita, maka janganlah kita menghiraukan keadilan atau ketidakadilan, kerahiman dan ketidakrahiman, pujian atau penghinaan, akan tetapi dengan menyisihkan semuanya menggunakan siasat apa saja yang menyelamatkan dan memelihara hidup negara kita itu”¹³.

Nasionalisme yang pada awalnya mementingkan hak-hak asasi manusia pada tahap selanjutnya menganggap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara lebih penting daripada kemerdekaan individual. Pandangan yang menjadikan negara sebagai pusat merupakan pandangan beberapa pemikir Eropa saat itu, diantaranya Hegel.

Dia berpendapat bahwa kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara-masyarakat, karena ia merupakan kepentingan obyektif sementara kepentingan masing-masing individu adalah kepentingan subyektif. Negara adalah ideal (geist) yang diobyektifikasi, dan karenanya, individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam negara. Lebih jauh dia menyatakan bahwa negara memegang monopoli untuk menentukan apa yang benar dan salah mengenai hakikat negara, menentukan apa yang moral dan yang bukan moral, serta apa yang baik dan apa yang destruktif¹⁴.

Hal ini melahirkan kecenderungan nasionalisme yang terlalu mementingkan tanah air (patriotisme yang mengarah pada chauvinisme), yang mendorong masyarakat Eropa melakukan ekspansi-ekspansi ke wilayah dunia lain. Absolutisme negara dihadapan rakyat memungkinkan adanya pemimpin totaliter, yang merupakan bentuk ideal negara yang dicitakan Hegel, sebuah monarki¹⁵.

¹³ Yatim, Badri, *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*, Hal. 22

¹⁴ Simandjuntak, Marsillam, *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2003), hal 112.

¹⁵ *Ibid.*,224.

Totaliterianisme yang dianjurkan oleh filsafat negara Hegel dapat menggiring sebuah pemerintahan menjadi pemerintahan yang fasis. Fasisme adalah doktrin yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap perintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Dalam sejarahnya, fasisme terkait erat dengan rasisme yang mengunggulkan sebagian ras (suku) atas sebagian yang lain.

Menurut Hugh Purcell nasionalisme dan rasisme merupakan gambaran paling terkenal dari fasisme pada tahun 1930-an. Rasisme memiliki kaitan erat dengan nasionalisme. Keduanya berbeda pada penekanan. Rasisme menekankan superioritas suku dan nasionalisme menekankan keunggulan bangsa (komunitas terbayang yang lebih besar dari suku).¹⁶

Manusia nasionalis adalah seseorang dengan kebanggaan terhadap bangsanya yang kadang diungkapkan dengan cara berlebihan. Nasionalisme dan rasisme memiliki keserupaan dalam hal pengunggulan dan kebanggaan terhadap sesuatu yang secara alamiah melekat pada setiap manusia. Yang pertama kebanggaan terhadap bangsa sistem pemerintahan, suku, dan budaya. Yang kedua kebanggaan terhadap suku.

NASIONALISME EKONOMI DALAM PERSPEKTIF ISLAM (AL-QUR'AN DAN HADIST)

Nasionalisme Ekonomi dalam perspektif Islam bagi pemeluknya bukan saja menjadi agama dan negara dalam pengertian studi Barat namun ia juga sistem yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dalam lingkup negara dan bangsa. Dalam bukunya, Marcel Boisard menilai bahwa universalitas Islam sebagai agama dan sistem sosial dapat dibuktikan dari lima segi: segi metafisik, segi agama, segi sosiologis, segi ekonomi dan segi politik. Nasionalisme atau keyakinan pada produk sendiri sebagai keimanan terhadap ke-Esaan Tuhan yang dituangkan dalam keyakinan yang sangat kuat, Islam adalah ideologi universal yang tidak bisa disamakan dengan ideologi dan agama apapun.¹⁷

Nasionalisme Ekonomi di Indonesia harus mengacu pada Pasal 33 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan (Pasal 33 Ayat 1) Cabang-cabang

¹⁶ Purcell, Hugh. Tanpa Tahun. *Fasisme*. Terjemahan oleh Faisol Reza dkk, (Jogjakarta: Insist Press, 2000), hal 11.

¹⁷ Boisard, Marcel A, *Humanisme Dalam Islam*. Terjemahan oleh M. Rasjidi. 1980. (Jakarta: Bulan Bintang, 1979), hal 183.

produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Pasal 33 Ayat 2) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat (Pasal 33 Ayat 3) dan Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional” (Pasal 33 Ayat 4)¹⁸

Namun jika cinta negeri bertentangan dengan agama seperti hijrah dan jihad, sehingga dia lebih mendahulukan cinta negeri daripada agama maka hukumnya haram. Allah mengancam orang-orang yang tidak hijrah karena lebih mencintai kampung halaman mereka.

Salah seorang ulama Indonesia KH Muhammad Hasyim Asy’ari (1871-1947) berhasil mencetuskan prinsip *hubbul wathani minal iman* (cinta tanah air adalah bagian dari iman). Konteksnya saat itu untuk membangkitkan nasionalisme rakyat Indonesia untuk mengusir para penjajah. Meminjam pernyataan ulama asal Kempek, Cirebon KH Said Aqil Siroj, agama tanpa nasionalisme akan menjadi ekstrem. Sedangkan nasionalisme tanpa agama akan kering. Hal ini terbukti ketika fenomena ekstremisme agama justru lahir dari orang dan kelompok orang yang terlalu eksklusif dan sempit dalam memahami agama tanpa memperhatikan realitas sosial kehidupan.¹⁹

Tanah air sebagaimana yang kita ketahui bersama adalah negeri tempat kelahiran. Ali bin Muhammad bin Ali Al-Jurjani (1984) mendefinisikan hal ini dengan istilah *al-wathan al-ashli* yaitu tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.

Al-Jurjani mengatakan, “*Al-wathan al-ashli adalah tempat kelahiran seseorang dan negeri di mana ia tinggal di dalamnya.*” Dari definisi ini, maka dapat dipahami bahwa tanah air bukan sekadar tempat kelahiran tetapi juga termasuk di dalamnya adalah tempat di mana kita menetap. Dapat dipahami pula bahwa mencintai tanah air adalah berarti mencintai tanah kelahiran dan tempat di mana kita tinggal. Pada dasarnya, setiap manusia itu

¹⁸ Artikel di Kompas.com dengan judul "Kembali ke Pasal 33 UUD 1945", <https://nasional.kompas.com/read/2011/12/22/02061513/kembali.ke.pasal.33.uud.1945?page=all> tanggal 23 Mei 2019.

¹⁹ KH. Sholeh Hayat, *Kyai dan Santri dalam Revolusi Jihad*, (Surabaya: PWLTNNU, 2016), 90.

memiliki kecintaan kepada tanah airnya sehingga ia merasa nyaman menetap di dalamnya, selalu merindukannya ketika jauh darinya, mempertahankannya ketika diserang dan akan marah ketika tanah airnya dicela.

Dengan demikian mencintai tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan *hubbul wathan minal iman*.

Konsepsi ganda Islam tentang individu sesuai dengan konsep universalitas yang diterima oleh filsafat Barat modern. Islam juga mengajarkan universalitas moral. Merupakan fakta yang tidak diragukan bahwa ajaran Islam dapat memasuki dan berkembang di daerah geografis dan lingkungan kultural yang berbeda-beda. Wahyu Ilahi ditujukan kepada semua manusia agar mereka memeluk Islam dan ditujukan pada tingkat lain secara khusus kepada kaum beriman untuk mematuhi aturan-aturannya.

Mematuhi ajaran yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw berarti memutuskan hubungan dengan orde sosial kesukuan dan mengidentifikasi dirinya dengan kesatuan baru²⁰. Namun afiliasi dan loyalitas kepada komunitas yang berdasarkan keimanan tidak berarti bahwa Islam melarang ikatan-ikatan lain selain ikatan berdasar keimanan. Alih-alih, Islam menganjurkan bentuk-bentuk ikatan lain, seperti ikatan keluarga, selama tidak bertentangan dengan Islam²¹.

Studi tentang hubungan Islam dan nasionalisme bermula dari kawasan Timur Tengah. Seperti di Indonesia, sejumlah pelajar Timur Tengah yang belajar di Eropa kembali dengan membawa konsep nasionalisme yang dipelajari di Barat. Konsep Barat tentang patria (tanah air) memengaruhi kata wathan dalam bahasa Arab dengan memberi pengertian politik padanya.

Mereka percaya bahwa kemajuan yang dicapai Eropa dipengaruhi oleh kuatnya patriotisme individu dan masyarakat terhadap negara. Hal ini tergambar dari pernyataan Al-Tahtawi, seorang teoritis nasionalisme Arab

²⁰ Dault, Adhyaksa, *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), hal 160.

²¹ *Ibid.*, 162.

berpengaruh, bahwa “Patriotisme adalah sumber kemajuan dan kekuatan, sarana untuk mengatasi jarak antara wilayah Islam dengan Eropa”²².

Perkembangan pemikiran nasionalisme sekular berdampak pada tatanan politik umat Islam. Bentuk negara-bangsa yang diadopsi dari Barat dijadikan sebagai satu-satunya bentuk pemerintahan yang sah dalam pergaulan internasional. Kenyataan ini berdampak pada terpecah-belahnya dunia Islam menjadi banyak negara-bangsa yang tidak lagi berdasar pada ajaran Islam yang baku. Basis material negara-bangsa yang hanya berpatok pada etnisitas, kultur, bahasa, dan wilayah dan mengabaikan kategori religius (keimanan).

Absennya keimanan dari rumusan nasionalisme menimbulkan kritik dari sebagian tokoh Islam. Mereka meyakini bahwa hal ini menyebabkan lemahnya kesatuan dunia Islam. Ali Muhammad Naqvi, misalnya, menyatakan bahwa Islam tidak sesuai dengan nasionalisme karena keduanya berlawanan secara ideologis. Kriteria nasional sebagai basis bangunan komunitas ditolak Al-Quran, karena ia hanya bersifat nasional-lokal sementara Islam mempunyai tujuan universal. Alasan lain adalah spirit sekular dalam nasionalisme yang menghendaki pemisahan tegas antara agama dan politik²³.

Kritik yang dilontarkan memposisikan Islam vis a vis nasionalisme. Namun dalam konteks Indonesia, sila-sila dalam Pancasila sebagai ideologi negara tidak satupun yang bertentangan dengan ajaran Islam. Bahkan Kuntowijoyo berpendapat bahwa Pancasila adalah obyektifikasi Islam. Meskipun dia mengingatkan bahwa Islam adalah agama dan Pancasila adalah ideologi. Bagi Kunto, ideologi dan agama dibedakan berdasarkan motif.²⁴

Ideologi tanpa agama dapat berjalan karena dalam diri manusia terdapat apa yang disebut Immanuel Kant sebagai categorical imperative, seperti nilai-nilai disiplin, setia kawan, kedermawanan, dan nilai etika yang lain. Dalam agama terdapat sistem dosa-pahala, surga-neraka, dan halal-haram yang semuanya berdasar keimanan dan kemudian menggiring seseorang untuk bertindak sesuai dengan kategori-kategori yang dia yakini.

Categorical imperative sebagai sistem sekular juga memiliki sanksi yang bersifat personal, berupa rasa bersalah, dan sanksi institusional yang terwujud dalam hukum formal.

²² *Ibid.*, 186.

²³ *Ibid.*, 188.

²⁴ Kuntowijoyo, *Identitas Politik Umat Islam*, (Bandung: Mizan, 1997) hal 85.

Pancasila menggabungkan konsep tentang kekuasaan (ketuhanan dan kedaulatan rakyat), konsep tentang proses (kemanusiaan dan kebangsaan), dan konsep tentang tujuan (keadilan sosial). Keunikan Pancasila adalah bahwa kekuasaan diletakkan di bawah Tuhan dan rakyat teodemokrasi. Istilah ini tersusun dari dua istilah : teokrasi dan demokrasi. Teokrasi (teosentrisme) dengan menghilangkan konotasi negatif ala Barat bagi umat Islam sama dengan istilah tauhid, yaitu menjadikan Tuhan sebagai pusat. Ini berarti bahwa kekuasaan Tuhan ada di atas kekuasaan negara.

Dalam pelaksanaannya kekuasaan dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip agama, seperti syura dan keadilan. Sementara demokrasi adalah sistem kekuasaan dengan kedaulatan berada sepenuhnya di tangan rakyat, tanpa harus terikat pada hukum-hukum Tuhan.

Dengan demikian, teodemokrasi adalah konsep tentang kekuasaan negara yang dibatasi oleh hukum Tuhan di satu sisi dan oleh rakyat di sisi lain. Dapat pula dirumuskan bahwa ia adalah kekuasaan yang dimiliki oleh rakyat dengan keyakinan bahwa sumber kekuasaan adalah Tuhan. Sebelum konsep demokrasi dikenal, tanggung jawab kekuasaan dilaksanakan hanya kepada Tuhan, sehingga sering disalahgunakan.

Dalam sejarah Jawa misalnya, seorang raja memakai gelar khalifatullah dan dalam sistem kesadaran rakyat kekuasaan raja dianggap sebagai kekuasaan Tuhan yang tidak bisa di ganggu gugat. Hal ini yang kemudian memberi konotasi negatif terhadap sistem teokrasi dalam kajian politik di Barat²⁵. Diagram berikut memperjelas perbedaan ketiga sistem kekuasaan di atas:

1. Teodemokrasi.
2. Demokrasi.
3. Teokrasi.

Nasionalisme Indonesia yang berbentuk negara-bangsa dan menggunakan demokrasi sebagai sistem politik tidak bertentangan dengan Islam sepanjang ia tidak melanggar batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam agama. Abul A'la Maududi menyatakan bahwa setiap individu dalam masyarakat Islam memiliki hak dan kekuasaan sebagai khalifah Allah dan dalam hal ini semua individu adalah sama. Institusi yang menangani urusan negara dibentuk sesuai dengan kehendak individu-individu dalam masyarakat. Pendapat mereka menentukan bentuk, pemimpin, dan segala

²⁵ Kuntowijoyo, *Burhan dan Muhammad* (Jakarta: Graha ilmu, 1997), hal 29.

sesuatu yang terkait dengan pemerintahan sesuai prinsip-prinsip Islam. Dalam hal ini, sistem politik Islam merupakan demokrasi yang sebenarnya.²⁶

KESIMPULAN

Nasionalisme Ekonomi dalam perspektif Islam bagi pemeluknya bukan saja menjadi agama dan negara dalam pengertian studi Barat namun ia juga sistem yang melingkupi seluruh aspek kehidupan manusia dalam lingkup negara dan bangsa.

Cinta tanah air adalah sudah menjadi tabiat dasar manusia. Kesimpulannya adalah bahwa mencintai tanah air bukan hanya karena tabiat, tetapi juga lahir dari bentuk dari keimanan kita. Karenanya, jika kita mengaku diri sebagai orang yang beriman, maka mencintai Indonesia sebagai tanah air yang jelas-jelas penduduknya mayoritas Muslim merupakan keniscayaan. Inilah makna penting pernyataan *hubbul wathan minal iman*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Lukman. Dkk. 1994. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Anderson, Benedict. 1991. *Imagined Community: Komunitas-Komunitas Terbayang*. Terjemahan oleh Omi Intan Naomi. 2002. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Boisard, Marcel A. 1979. *Humanisme Dalam Islam*. Terjemahan oleh M. Rasjidi. 1980. Jakarta: Bulan Bintang.
- Burhan, A.S. dan Muhammad, Agus (Eds.). 2001. *Demokratisasi dan Demiliterisasi: Wacana dan Pergulatan di Pesantren*. Jakarta: P3M.
- Dault, Adhyaksa. 2005. *Islam dan Nasionalisme: Reposisi Wacana Universal Dalam Konteks Nasional*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Kuntowijoyo. 1997. *Identitas Politik Umat Islam*. Bandung: Mizan.
- Maududi, Abul A'la. Tanpa Tahun. *Islam Kaffah: Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup*. Terjemahan oleh Muhammad Humaidi. 2004. Jogjakarta: Cahaya Hikmah.
- Purcell, Hugh. Tanpa Tahun. *Fasisme*. Terjemahan oleh Faisol Reza dkk. 2000. Jogjakarta: Insist Press.

²⁶ Maududi, Abul A'la. Tanpa Tahun. *Islam Kaffah: Menjadikan Islam Sebagai Jalan Hidup*. Terjemahan oleh Muhammad Humaidi, (Jogjakarta: Cahaya Hikmah, 2004), hal 54.

- Riff, Michael A. (ed). 1982. *Kamus Ideologi Politik Modern*. Terjemahan oleh M. Miftahuddin dan Hartian Silawati. 1995. Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Simandjuntak, Marsillam. 2003. *Pandangan Negara Integralistik: Sumber, Unsur, dan Riwayatnya Dalam Persiapan UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Yatim, Badri. 2001. *Soekarno, Islam, dan Nasionalisme*. Bandung: Nuansa.

